

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 11 Februari 1979, revolusi pecah di negara Iran. Revolusi berhasil menggulingkan rezim Shah Mohammed Reza Pahlevi. Revolusi tersebut, merupakan puncak kemarahan rakyat Iran atas tindakan rezim Shah Reza Pahlevi selama berkuasa.

Mohammed Reza Pahlevi berkuasa sejak didaulat menjadi raja Iran pada tanggal 17 Desember 1941.¹ Selama memimpin Iran, Shah Reza Pahlevi mempunyai ambisi untuk menjadikan Iran negara yang ditakuti di wilayah teluk Persia. Shah Reza Pahlevi juga menghendaki Iran menjadi negara industri dan modern.

Berdasarkan ambisinya tersebut, Shah Reza Pahlevi memberikan perhatian lebih pada pembangunan pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Shah menyediakan anggaran bagi sektor pertahanan dan keamanan sebesar US \$ 7,8 Milyar atau 24 % dari seluruh anggaran pada periode 1977 s.d 1978. Pada sektor ekonomi, Shah memberikan perhatian pada industri konstruksi mobil, elektronik, dan peralatan rumah tangga sebagai upaya meningkatkan GNP (*Gross National Product*) Iran. GNP Iran meningkat dari US \$ 450 pada tahun 1971 menjadi US \$ 2400 pada tahun 1978. Selain itu,

¹ M. Riza Sihbudi, *Dinamika Republik Islam Iran; Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), 17.

Shah berhasil meningkatkan produksi minyak Iran mencapai angka enam juta barrel per hari.²

Upaya Industrialisasi Iran di era Shah, menjadikan hubungan Iran lebih dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat banyak memberi bantuan kepada Rezim Shah. Sekitar 70% peralatan militer Iran berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, Iran di era Shah mempunyai hubungan baik dengan Israel. Israel adalah salah satu pembeli minyak terbesar Iran.

Sikap otoriter rezim Shah Reza Pahlevi merupakan salah satu pemicu kejatuhan Shah. Revolusi Islam Iran pecah, menggulingkan rezim Shah Reza Pahlevi dan membawa Imam Khomeini menjadi pemimpin baru Iran.

Imam Khomeini adalah seorang pemuka agama yang sangat kuat memegang teguh ideologinya. Ideologi inilah yang tercermin dalam sistem politik Iran pasca revolusi. Wilayatul Faqih dirumuskan Imam Khomeini sebagai sistem politik Iran pasca revolusi. Pemilihan sistem Wilayatul Faqih berdasarkan pada mazhab syi'ah. Syi'ah sebagai mazhab mayoritas masyarakat Iran memberi pengaruh bagi negara pasca revolusi. Syi'ah sebagai mazhab tidak memisahkan wilayah agama dan politik. *Imamah* (kepemimpinan) merupakan hal yang penting dalam mazhab ini. Hal inilah yang tercermin dalam Wilayatul Faqih. Dalam suatu kesempatan Imam Khomeini mengatakan bahwa "Ingin menjadikan negara Islam seperti 10

² *Ibid.* 20.

tahun pemerintahan nabi Muhammad saw dan 5 tahun pemerintahan Ali Bin Abi Thalib.”³

Politik luar negeri Iran pasca revolusi sangat berbeda dengan politik luar negeri di masa Shah Reza Pahlevi. Iran pasca revolusi adalah Iran yang anti Amerika Serikat dan Israel. Sikap ini tercermin dari dukungan Iran secara terbuka kepada perjuangan rakyat Palestina, bahkan Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel dan membuka kantor PLO di Iran.⁴ Politik luar negeri Iran di masa Imam Khomeini adalah politik luar negeri yang sangat ideologis, dengan menjadikan Amerika Serikat sebagai musuh utama, simbol perlawanan Iran terhadap barat.

Pasca Imam Khomeini politik dalam dan luar negeri Iran menunjukkan suatu gejala yang mengindikasikan perubahan. Upaya perubahan tersebut ditandai dengan terpilihnya Rafsanjani. Jika sebelumnya kebijakan politik Iran menekankan aspek ideologis, maka pada masa Rafsanjani kebijakan politik Iran menampakkan wujud moderat. Kondisi internal Iran pasca perang Iran-Iraq membuat Rafsanjani memilih pembangunan ekonomi sebagai fokus utama. Sedangkan, orientasi politik luar negeri yang semula sangat ideologis menjadi politik luar negeri yang realistis dan pragmatis.⁵ Rafsanjani memprakarsai hubungan kembali dengan negara-negara Arab dan negara-negara Eropa. Rafsanjani juga memilih sikap yang lebih moderat dalam upaya membuka hubungan kembali dengan Amerika Serikat.

³ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 11.

⁴ M. Riza Sihbudi, *Op.Cit*, 36.

⁵ Bambang Giyanto, *Dimensi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 11.

Sikap moderat Rafsanjani, diteruskan oleh Khatami. Khatami merupakan Presiden Iran pasca kepemimpinan Rafsanjani. Khatami merupakan tokoh reformis yang memperjuangkan demokrasi dalam kehidupan politik Iran. Selama menjabat menjadi presiden, Khatami dengan giat melancarkan visinya memperjuangkan demokrasi. Pada kebijakan politik luar negeri, Khatami bisa dikatakan sebagai tokoh yang berupaya menciptakan iklim politik luar negeri Iran yang tidak terlalu ideologis. Keberhasilan Khatami ialah penyelenggaraan Konferensi OKI di Teheran tahun 1997.⁶ Khatami juga berupaya memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat.

Meskipun politik luar negeri Iran mengalami dinamika dan mendorong normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab maupun Eropa. Namun, upaya normalisasi tersebut tidak merubah sikap Iran yang menolak keberadaan Israel di tanah Palestina. Dalam perkembangannya baik Rafsanjani maupun Khatami, sebagai Presiden yang bercorak moderat tetap menentang keberadaan Israel di Timur Tengah.

Pasca revolusi Islam Iran, hubungan Iran dan Suriah semakin baik. Hubungan Iran dan Suriah semakin erat pada saat terjadi perang Iran-Irak. Suriah bersama Libya secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Iran. Suriah dan Libya mensuplai berbagai jenis peralatan militer ke Iran, sebaliknya Iran mengirimkan minyak dan komoditi lainnya ke Suriah dan Libya dengan harga lebih murah. Hubungan kedua negara yang terbangun

⁶ *Ibid.* 94.

pasca revolusi Iran berjalan cukup baik. Iran dan Suriah mampu menjaga hubungan baik kedua negara.

Pada penghujung tahun 2010, pergolakan politik kembali terjadi di Timur Tengah. Dunia internasional dikejutkan dengan pergolakan politik yang terjadi di Timur Tengah, mulai dari Tunisia, Mesir, Libya, Aljazair, Bahrain, Yaman, dan Suriah. Peristiwa ini dimulai dengan pergolakan politik yang terjadi di Tunisia.

Mohammad Bouazizi, seorang tukang sayur melakukan aksi bakar diri sebagai akibat dari ketidakadilan ekonomi maupun politik yang menyimpannya. Situasi ekonomi dan politik tidak pernah membaik selama masa pemerintahan Ben Ali. Tunisia menghadapi masalah pengangguran, kenaikan harga-harga pokok, dan hutang luar negeri yang menumpuk.⁷ Sikap represif Ben Ali terhadap rakyat Tunisia semakin memperburuk situasi Tunisia. Aksi bakar diri Mohammad Bouazizi seolah menjadi pemantik dari kemarahan rakyat Tunisia yang telah memuncak. Perlawanan rakyat Tunisia akhirnya mampu menggulingkan pemerintahan Ben Ali.

Peristiwa yang terjadi di Tunisia menginspirasi banyak negara di Timur Tengah. Mesir adalah salah satu dari sekian banyak negara yang terinspirasi dan mengalami pergolakan politik. Sama halnya dengan Tunisia, Mesir juga mengalami situasi dan kondisi yang buruk di sektor ekonomi dan politik. Pengangguran kaum muda Mesir sangat tinggi. Jumlah angkatan kerja hanya

⁷ Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah; Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*, (Yogyakarta: Narasi, 2011), 21

mampu terserap 4% per tahun.⁸ Selain itu, Hosni Mubarak sebagai rezim yang berkuasa juga bersikap represif. Mubarak membungkam kebebasan berpendapat. Bahkan rezim Mubarak memblokir situs-situs jejaring sosial yang akhirnya menimbulkan kemarahan rakyat Mesir.

Reaksi penentangan rakyat terhadap para penguasa terus menyebar diantara negara-negara Timur Tengah lainnya. Aljazair, Bahrain, Yaman, Libya, dan Suriah mengalami kondisi serupa. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terjadi di Libya dan Suriah. Pergolakan politik terjadi dalam waktu yang sangat lama di kedua negara ini. Rezim Moammar Khadafi berhasil digulingkan melalui waktu yang sangat lama dan melibatkan intervensi negara asing dalam proses penggulingannya.

Dalam menyikapi pergolakan politik yang terjadi di Timur Tengah, Iran mendukung gerakan rakyat. Hal ini tercermin dari sikap para pemimpin Iran dalam menyikapi pergolakan-pergolakan politik di Timur Tengah. Menurut pemimpin spiritual Iran Ayatullah Ali Khamenei dan Presiden Ahmadinejad, "Gerakan rakyat yang terjadi di Mesir merupakan hal yang sama dengan revolusi Islam Iran tahun 1979."⁹ Iran mendukung gerakan rakyat melawan ototarianisme rezim penguasa di negara-negara Timur Tengah.

Pergolakan politik yang berkepanjangan juga terjadi di Suriah. Presiden Bashar Al Assad terus didesak untuk mundur. Meskipun pergolakan politik tersebut belum berhasil menggulingkan Bashar, tetapi kondisi tersebut berdampak negatif bagi Suriah.

⁸ *Ibid.* 71.

⁹ *Tak Ada Temoat Bagi Negara Arogan*, (diakses 02 juni 2012); diperoleh dari <http://dunia.vivanews.com/news/read/204319-ahmadinejad-mubarak-jatuh-bentuk-baru-timteng>.

Pergolakan politik di Suriah bermula dari Dar'a, sebuah kota yang terletak 100 kilometer barat daya dari Damaskus, dekat perbatasan Yordania. Penduduk kota menuntut pembebasan 14 murid sekolah yang ditahan oleh aparat keamanan. Para demonstran juga menuntut diberi kebebasan yang lebih besar dan demokrasi.¹⁰ Demonstrasi di kota inilah yang menjadi cikal bakal pergolakan politik di Suriah. Bahkan hanya dalam waktu dua bulan, korban tewas diperkirakan mencapai 1.000 orang.¹¹ Perlawanan oposisi dan upaya pemerintah mempertahankan kekuasaan terus berlanjut. Korban tewas terus berjatuhan, sampai bulan April 2012 menurut PBB "Lebih dari 8.000 orang tewas dibunuh tentara dan paling kurang 14.000 orang ditahan".¹² Tetapi berdasarkan data yang dirilis pemerintah Suriah pada bulan Februari, korban tewas berjumlah 3.838 orang dengan rincian 2.493 warga sipil dan 1.345 tentara.¹³

Kondisi yang memprihatinkan tersebut mengundang reaksi dari negara-negara di seluruh dunia. Dalam upaya untuk mengakhiri krisis, PBB dan Liga Arab berinisiatif menunjuk Kofi Annan sebagai utusan perdamaian di Suriah. Tetapi, upaya Kofi Annan untuk menghentikan pembunuhan serta kekerasan belum menemui titik terang. Ditengah upaya tersebut, Suriah kembali diguncangkan dengan peristiwa di kota Houla yang menewaskan lebih dari

¹⁰ Trias Kuncabuno, "Janji 10 April" Kompas, 10 April 2012, 10.

116 orang warga sipil.¹⁴ Meskipun banyak pihak menuding bahwa peristiwa tersebut diakibatkan oleh pemerintah, tetapi Bashar Al Assad menolak tuduhan tersebut. Bashar menuding pihak teroris yang dibantu pihak asing yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.¹⁵

Situasi yang terjadi di Suriah menimbulkan kemarahan banyak negara, khususnya negara-negara Barat. Turki memberlakukan sanksi ekonomi dan membekukan aset Suriah. Sementara itu Uni Eropa berencana memberi sanksi berupa pemberlakuan pelarangan terbang dan lalu lintas kelautan.¹⁶ Pasca peristiwa Houla yang menewaskan lebih dari 100 warga sipil. Banyak negara bereaksi sangat keras atas kejadian tersebut. Tercatat mulai dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Kanada, Bulgaria, Belanda, Australia, Turki, dan Jepang mengusir diplomat Suriah.¹⁷

Namun sikap yang berbeda ditunjukkan oleh Iran dalam menyikapi krisis Suriah. Dalam menyikapi krisis Suriah, sikap Iran berbeda dengan negara-negara Barat yang menginginkan rezim Bashar Al Assad turun dari jabatannya. Iran dengan tegas mendukung pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian menyebutkan bahwa “Iran tetap akan mendukung total

¹⁴ PBB: *Sedikitnya 116 Tewas di Kota Houla, Suriah*, (diakses 18 juni 2012); diperoleh dari <http://www.voaindonesia.com/content/pbb-sedikitnya-116-tewas-di-houla-suriyah-tengah/1105919.html>

¹⁵ *Presiden Suriah bantah bunuh 100 warga Houla*, (diakses 18 Juni 2012); diperoleh dari <http://www.tribunnews.com/2012/06/04/presiden-suriyah-bantah-bunuh-100-warga-houla>

¹⁶ *Uni Eropa Akan Perketat Sanksi Suriah*, (diakses 18 Juli 2012); diperoleh dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/03/11/m0pfzx-uni-eropa-akan-perketat-sanksi-suriyah>

¹⁷ *Sejumlah Negara Usir Diplomat Suriah*, (diakses 18 Juni 2012); diperoleh dari <http://dunia.vivanews.com/news/read/318671-selumlah-negara-usir-diplomat-suriyah>

pemerintah dan rakyatnya.”¹⁸ Dukungan ini merupakan cerminan hubungan baik Iran dan Suriah yang sudah terbangun sejak lama.

Sikap Iran mendukung gerakan rakyat melawan otoritarianisme dalam pergolakan politik di negara-negara Timur Tengah. Dukungan tegas Iran terhadap gerakan rakyat diperlihatkan Iran saat Tunisia, Mesir, Yaman, Bahrain, dan Libya mengalami pergolakan politik. Namun sikap yang berbeda muncul saat Suriah mengalami pergolakan politik yang serupa dengan negara Timur Tengah lainnya. Dalam kasus pergolakan politik yang terjadi di Suriah, Iran mendukung pemerintahan Bashar Al Assad.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang penulis ambil ialah apa kepentingan Iran mendukung pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui kepentingan Iran mendukung pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah
2. Mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya yang terkait dengan politik luar negeri Iran dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

¹⁸ *Iran Tetap Lindungi Assad*, (diakses 24 Maret 2012); diperoleh dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/12/115389638/iran-tetap-lindungi-assad>

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hal penting dalam upaya menganalisa suatu permasalahan. Untuk menganalisa permasalahan dengan tepat, diperlukan suatu konsep atau teori yang tepat dalam membentuk suatu hipotesa. Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau fenomena tertentu.¹⁹ Sedangkan teori adalah penggabungan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan keterhubungan konsep-konsep secara logis. Teori juga berfungsi mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin meramalkan kemungkinan kejadian itu di masa depan.²⁰ Untuk menganalisa kepentingan Iran mendukung pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah, penulis menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Teori Politik Luar Negeri

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri atau *Foreign Policy* adalah “Merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.”²¹

¹⁹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 93-94.

²⁰ *Ibid.* 185.

²¹ Jack C. Plano & Roy Olton, *The International Politics: Principles and Practice*, (New York: McGraw-Hill, 1994), 10.

Politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan negara atau aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari situasi dan kondisi politik dalam negeri. Dalam hubungannya dengan negara lain, politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan.

Lebih lanjut, menurut Holsti, politik luar negeri mempunyai empat komponen, mulai dari yang umum hingga yang spesifik. *Pertama*, orientasi kebijakan luar negeri. *Kedua*, peran nasional. *Ketiga*, tujuan-tujuan, dan *keempat*, tindakan-tindakan.²²

Orientasi kebijakan luar negeri yang dimaksudkan Holsti di bagi menjadi tiga. *Pertama*, Orientasi Isolasi. Orientasi digunakan untuk membatasi hubungan dengan negara lain dalam upaya menjaga kepentingannya. Hal ini biasanya dilakukan jika negara merasa cukup secara ekonomi maupun sosial sehingga tidak membutuhkan bantuan dari negara lainnya. *Kedua*, Strategi nonblok. Negara-negara melakukan strategi nonblok biasanya digunakan untuk kepentingan strategis, negara-negara bersatu untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan mempertahankan diri dari pengaruh negara-negara besar.²³ *Ketiga*, Koalisi dan pembangunan aliansi. Negara yang berusaha membangun upaya koalisi atau aliansi diasumsikan bahwa mereka tidak dapat

²² K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, 4ed, terj. M. Tahir Azhary, S.H., (Jakarta: Erlangga, 1983), 107.

²³ Abubakar Eby Hara, *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri; Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*, (Bandung: Nuansa, 2011), 40.

mencapai tujuan, mempertahankan kepentingan, atau menghalangi ancaman yang dirasakan oleh negara tersebut.

Komponen yang selanjutnya adalah peran nasional. Konsepsi peran nasional berhubungan erat dengan orientasi politik luar negeri. Peran nasional merupakan rumusan pembuat kebijakan mengenai jenis keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan umum yang sesuai dengan negara dan dilaksanakan oleh negara. "Peran nasional yang umum adalah "pembela regional" yaitu peran melindungi negara lain dalam suatu wilayah tertentu atau "mediator" yaitu peran membantu penyelesaian konflik internasional."²⁴

Selanjutnya adalah tujuan politik luar negeri. Tujuan politik luar negeri ini terbagi menjadi tiga hal. *Pertama*, kepentingan dan nilai "inti". Kepentingan ini merupakan kepentingan yang untuk mencapainya dibutuhkan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Kepentingan ini merupakan kepentingan jangka pendek, karena tujuan lain tidak bisa dicapai jika kepentingan ini belum terealisasi. Salah satu contoh kepentingan ini adalah kemerdekaan. *Kedua*, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah ini mencakup upaya negara memenuhi tuntutan dan kebutuhan ekonomi melalui tindakan internasional, meningkatkan prestise suatu negara, dan upaya perluasan suatu negara.²⁵ *Ketiga*, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang merupakan impian atau cita-cita suatu negara atau sering disebut sebagai visi dan misi.

satu contoh tujuan jangka panjang ialah upaya mengkomunikasikan dunia atau menciptakan dunia yang demokratis.²⁶

Komponen terakhir adalah tindakan. Orientasi, peran nasional, dan tujuan politik luar negeri mempunyai hubungan yang logis dan tercermin dalam sebuah tindakan. Tindakan adalah hal yang dilakukan oleh negara kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu.²⁷

Orientasi politik luar negeri Iran dalam konteks hubungan Iran dan Suriah adalah model orientasi koalisi dan pembangunan aliansi. Iran berusaha membangun koalisi dan aliansi karena Iran menyadari bahwa untuk mencapai tujuannya, Iran tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya dalam bentuk peran nasionalnya, Iran membangun perannya sebagai negara yang anti-Zionis dan anti-imperialis. Zionis Israel dan imperialisme negara Barat dirasakan sebagai ancaman sehingga Iran memposisikan diri sebagai negara yang menentang ancaman tersebut. Kebijakan politik luar negeri tersebut bertujuan untuk menghancurkan Israel, menolak keberadaan Israel di Timur Tengah dan menentang intervensi negara Barat.

Hal ini tercermin dari tindakan Iran yang mendukung rezim yang berkuasa dalam krisis Suriah. Dalam krisis Suriah, Iran mendukung reformasi pemerintahan Suriah yang ditawarkan Rezim Bashar Al Assad.

Selain itu Iran juga menolak dengan tegas segala bentuk intervensi

militer yang dilakukan oleh negara lain dalam urusan dalam negeri Suriah.

Iran menjalin hubungan dengan Suriah karena kedua negara mempunyai kesamaan pandangan tentang masalah Israel. Iran dan Suriah merupakan negara yang menolak keberadaan Israel di Timur Tengah. Kedua negara mendukung perjuangan rakyat Palestina. Suriah dalam pandangan Iran mempunyai peran strategis dalam upaya perlawanan terhadap keberadaan Israel. Suriah merupakan negara penghubung Iran dengan Hizbullah. Berdasarkan hal ini maka Iran mendukung rezim berkuasa dalam krisis Suriah. Hal ini didasarkan pada kepentingan Iran dalam upaya penolakan terhadap Israel. Jatuhnya rezim Bashar Al Assad akan mempengaruhi perjuangan tersebut.

2. Teori Hegemoni

Hegemoni dalam bahasa Yunani Kuno disebut *eugemonia*. Kata *eugemonia* digunakan dalam bahasa Yunani Kuno untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polis* atau *citystates*) secara individual.²⁸ Istilah hegemoni pertama kali dipakai oleh Perry Plekanov dan pengikut Marxis Rusia lainnya pada tahun 1880-an yang menunjukkan perlunya kelas pekerja membangun aliansi dengan petani untuk meruntuhkan gerakan Tsar.²⁹

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pendiri gerakan buruh Rusia ini menjadi bahan berharga bagi Lenin untuk menyempurnakan

²⁸ Nezar Patria & Andi Arief, *Antonio Gramsci; Negara & Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 115.

²⁹ Roger Simon, *...*

dasar-dasar konsep hegemoni. Bagi Lenin, hegemoni merupakan strategi untuk revolusi. Strategi yang harus dijalankan oleh kelas pekerja dan anggota-anggotanya untuk memperoleh dukungan mayoritas.³⁰

Pasca Lenin, hegemoni menjadi suatu konsep yang menarik pasca Antonio Gramsci menjadikan hegemoni sebagai bagian yang penting dalam tulisan-tulisannya. Teori hegemoni Gramsci menjadi salah satu teori politik yang sangat penting pada abad XX. Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan bahwa tidak cukupnya kekuatan fisik dalam kontrol sosial politik.³¹

Menurut Roger Simon, "Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi."³² Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus.

Bagi Gramsci, kelas sosial akan memperoleh keunggulan (supremasi) melalui dua cara yaitu melalui dominasi atau paksaan dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Melalui cara kepemimpinan intelektual dan moral inilah yang disebut Gramsci sebagai hegemoni.³³

Hegemoni satu kelompok atas kelompok lainnya dalam pengertian Gramsci tidaklah berlandaskan pada upaya dominasi (paksaan). Hegemoni

³⁰ *Ibid.* 21.

³¹ Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 31.

³² Roger Simon, *Op.Cit.* 19.

³³ Negeri Datin & Andi Arief, *Op.Cit.* 112.

tersebut bisa diraih dengan upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual. Berkuasa dengan kepemimpinan dan moral sehingga mampu mendapatkan kekuasaan hegemonik. Menurut Arief Budiman, "Kekuasaan hegemonik merupakan kekuasaan dari satu kelompok masyarakat yang diterima atau dianggap sah oleh kelompok-kelompok masyarakat lainnya."³⁴

Selain upaya mendapatkan kekuasaan hegemonik, salah satu hal yang penting adalah mempertahankan hegemoni setelah kekuasaan diperoleh. Menurut Gramsci, "Ketika suatu kelompok sosial telah menjadi dominan dan mempertahankan dengan gigih kekuasaan yang ada dalam genggamannya, mereka harus terus memimpin".³⁵ Kelompok yang berkuasa harus terus memperjuangkan legitimasinya atas kelompok-kelompok yang dia kuasai. Hegemoni tidak dapat diperoleh begitu saja tetapi harus di perjuangkan terus menerus.³⁶

Dukungan Iran terhadap pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah, bisa dilihat sebagai upaya Iran untuk mempertahankan hegemoni ideologi syiah. Kemenangan Revolusi islam Iran merupakan peristiwa penting bagi kebangkitan syiah. Kemenangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh mazhab syiah yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Iran. Iran adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan bermazhab syiah.

³⁴ Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 72-73.

³⁵ Roger Simon, *Op. Cit.*, 45.

³⁶ *Ibid.*

Kepemimpinan merupakan masalah yang prinsipil dalam mazhab syi'ah. Kuatnya pengaruh mazhab syi'ah sangat terasa dalam kemenangan revolusi. Imam Khomeini yang kemudian menjadi pemimpin tertinggi Iran membangun Iran dengan sangat Ideologis. Khomeini mempunyai cita-cita untuk mengeksport revolusi dan mazhab syi'ah ke berbagai negara di dunia Islam. *Issue* ekspor revolusi syi'ah memberikan kekhawatiran bagi negara-negara yang menjadi basis Sunni. Konflik Sunni-syi'ah yang telah berjalan sangat lama tidak dapat dinafikan.

Konflik Sunni-syi'ah yang telah lama terjadi menghiasi sejarah konflik di dunia Islam, kembali menghiasi konflik yang terjadi di Suriah. Jumlah penduduk Suriah terdiri dari 75% Muslim Sunni, 19% umat Kristen, 11,5% Alawiy, 3% Druze, dan 1,5% Ismailiy.³⁷ Meskipun menang dalam jumlah dan mempunyai pengaruh secara kultural, tetapi kaum Sunni di Suriah tidak mendapat peran yang proporsional dalam dinamika politik Suriah. Kepemimpinan Suriah dipimpin oleh keluarga Assad, seorang syi'ah Alawiy.

Keberadaan Bashar Al Assad yang duduk dalam tampuk kepemimpinan di Suriah akan memudahkan bagi kelompok syi'ah untuk melancarkan kekuasaan hegemonik. Pemimpin merupakan sosok sentral yang mampu memberikan pengaruh bagi setiap orang yang dipimpinnya. Kelompok syi'ah akan lebih mudah melakukan upaya-upaya hegemoni

³⁷ Shireen T. Hunter (Ed), *Politik Kebangkitan Islam; Keragaman dan Kesatuan*, (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2010), 59.

ideologi dengan Bashar Al Assad tetap menjadi orang nomor satu di Suriah.

Krisis Suriah yang berpotensi menggulingkan rezim Bashar Al Assad, menjadi perhatian serius bagi Iran. Iran dalam berbagai kesempatan selalu mendukung pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah. Hal ini tidak terlepas dari kesamaan mazhab yang dianut oleh Iran dan pemerintahan Bashar Al Assad. Keduanya adalah para penganut mazhab syi'ah. Dukungan Iran terhadap pemerintahan Bashar Al Assad merupakan upaya Iran mempertahankan ideologi syi'ah.

E. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan dan dianalisa oleh kerangka pemikiran yang penulis anggap membantu, maka diambil Hipotesis bahwa kepentingan Iran mendukung pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah, ialah :

1. Sebagai upaya mempertahankan aliansi strategis dengan Suriah dalam upaya perjuangan menolak keberadaan Israel

2. Mempertahankan pengaruh politik di Suriah

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan menggunakan metode umum dalam mengolah data dengan mengumpulkan data dari sumber – sumber sebagai berikut :

1. Studi literatur atau *Library research*, metode ini digunakan sebagai data sekunder untuk mempelajari sumber-sumber yang relevan dalam rangka menganalisis masalah.
2. Studi media massa atau *Media research*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai media massa seperti internet, koran, majalah, jurnal dan lain sebagainya untuk menemukan referensi lain sebagai sumber data.

Dalam menganalisis data, penulis mencoba menginterpretasikan data dari literatur dan media massa dengan fakta yang terjadi. Dalam pembuktian hipotesis, penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil interpretasi masalah.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi jangkauan penelitian dengan meneliti kepentingan Iran mendukung pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah sejak Iran mulai membina hubungan baik dengan Suriah selama kepemimpinan presiden Ahmadinejad sampai dengan dukungan Iran selama krisis Suriah. Pembatasan jangkauan penulisan ini digunakan untuk menghindari kompleksitas observasi dan analisis.

H. Sistematika Penulisan

Pada bab I, penulis akan mendeskripsikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Pengumpulan Data, Jangkauan penelitian, dan Sistematika Penulisan. Selanjutnya, pada bab II, diawali dengan pemaparan Revolusi Islam Iran menggulingkan rezim otoriter rezim Shah Reza Phalevi yang pro Barat. Dinamika politik Iran pasca revolusi dan dilanjutkan dengan hubungan Iran dan Suriah. Berikutnya di bab III, penulis mendeskripsikan peran Iran dalam krisis Suriah. Pada bab ini, penjelasan penulis dibuka dengan krisis Timur Tengah dan sikap Iran dalam krisis tersebut. Dilanjutkan dengan penjelasan tentang krisis di Suriah. Sikap dan peran Iran dalam krisis di Suriah. Kemudian, pada bab IV menulis akan menerangkan sebab-sebab dukungan Iran terhadap pemerintahan Bashar Al Assad dalam krisis di Suriah. Terakhir, pada bab V penulis akan mengakhiri serangkaian tulisan ini dalam sebuah kesimpulan.